

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan dunia saat ini telah memasuki sebuah era baru dimana dalam era berbagai bidang dan sendi kehidupan masyarakat yang biasanya kita sebut sebagai era globalisasi. Pada era ini, masyarakat semakin mudah dalam mendapatkan informasi yang diinginkan, baik lokal maupun mancanegara. Salah satu ciri dari era globalisasi ini adalah munculnya istilah perdagangan bebas, dimana masing-masing semua orang dari kalangan manapun baik dari kalangan bawah maupun kalangan atas dipermudah dalam hal transaksi melakukan hubungan perdagangan antara satu sama lainnya tanpa adanya batasan atau halangan yang berarti.

Hal ini mengakibatkan bermunculannya berbagai macam perusahaan-perusahaan baru baik yang berskala besar maupun berskala kecil sehingga dapat pula meningkatkan laju persaingan perusahaan-perusahaan tersebut khususnya dalam persaingan dagang maupun perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa. Yang akan berlomba-lomba untuk dapat menghasilkan pendapatan yang optimal dan memuaskan. Dan perusahaan ini yang akan bersaing tidak hanya perusahaan dagang dan jasa saja, tetapi juga perusahaan industri.

Di tengah persaingan ketat antar perusahaan yang berorientasi pada laba yang besar, Indonesia memiliki bentuk usaha yang memiliki ciri khas perekonomian di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah Indonesia mengatur bentuk usaha tersebut yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia

disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Salah satu bentuk usaha yang melandaskan kegiatannya sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan pada asas kekeluargaan dan mengutamakan pada kemakmuran masyarakat ialah koperasi.

Koperasi adalah salah satu bentuk usaha berbadan hukum yang berdiri di Indonesia. Menurut undang-undang no 25 tahun 1992 pasal 1 ayat 1 tentang perkoperasian, koperasi indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang, seseorang, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Undang-undang ini merupakan hasil peresmian dari bab III Pasal 3 undang-undang koperasi no 14 tahun 1965 yang berbunyi "koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat revolusi yang berfungsi sebagai tempat peresmian insane masyarakat serta sebagai wahana menuju sosialisme Indonesia berdasarkan pancasila yakni mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar seperti kekeluargaan, 4 kesetiakawanan (solidaritas), keadilan, gotong-royong, demokrasi, dan kebersamaan dapat dijadikan sebagai faktor kekuatan koperasi dalam keberadaannya di tengah masyarakat.

Koperasi berperan positif dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Koperasi merupakan sarana peningkatan kemajuan ekonomi bagi anggotanya dan bagi masyarakat luas. Hal ini sesuai dengan tujuan koperasi, khususnya untuk memajukan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

Koperasi juga merupakan wadah demokrasi ekonomi milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Tujuan utama dalam koperasi

karyawan melayani dan membantu keperluan anggotanya dan masyarakat umum dalam memenuhi kebutuhan kepengurusan surat-surat tanah yang ada di lingkup kantor. Salah satu nama dari koperasi tersebut adalah koperasi (KPRI) Bhumi Sejahtera.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bhumi Sejahtera ini pada awal didirikannya memiliki jumlah anggota sedikit, namun saat ini jumlah anggotanya bertambah menjadi 96, anggota laki-laki 71 dan anggota perempuan 25. Keanggotaan KPRI "BHUMI SEJAHTERA" sesuai bunyi anggaran dasar pasal 8 ayat (1) adalah semua pegawai negeri sipil atau karyawan/karyawati kantor pertanahan kota surabaya, sehingga penambahan atau pengurangan jumlah anggota KPRI di pengaruhi oleh jumlah karyawan/karyawati yang ada pada kantor pertanahan surabaya.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bhumi Sejahtera juga merupakan wadah demokrasi ekonomi milik bersama para anggota, pengurus maupun pengelola. Tujuan utam pendirian koperasi karyawan yaitu untuk melayani dan membantu keperluan anggotanya dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Salah satu dalam bentuk bantuan koperasi terhadap anggotanya ialah dengan melalui dua divisi, yaitu divisi penjualan dan divisi simpan pinjam.

KPRI Bhumi Sejahtera adalah salah satu contoh koperasi dagang skala kecil-menengah yang menyediakan kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat dalam bentuk berbagai map/blanko yang akan melakukan kepengurusan dalam pengajuan permohonan dalam pembuatan sertifikat-sertifikat tanah yang akan diajukan kepada kantor pertanahan kota surabaya

1.

Berikut ini adalah tabel penjualan map/blanko dalam pengurusan sertifikat yang masih berlaku di dalam lingkungan kantor pertanahan surabaya 1 saat ini :

Tabel 1. Tabel penjualan map/blanko dalam pengurusan sertifikat yang masih berlaku di dalam lingkungan kantor pertanahan surabaya 1

No	Jenis Map	Keterangan
1	Pengecakan Sertifikat	Pengecekan Sertifikat Tanah
2	Peralihan Hak	Jual-Beli, Hibah, Pembagian Hak Bersama, Tukar Menukar, Lelang, Marger, Ganti Nama (Pemegang Hak)
3	Roya	Penghapusan Roya
4	Hak Tanggungan	HT, Cessie, Subrograsi, Ganti Nama (Bank)
5	Pengukuran	Pemisahan, Pemecahan, Peta Bidang, Surat Ukur, Pengembalian Batas, Pengukuran Ulang, Penggabungan.
6	Zona	Permohonan Informasi Nilai Tanah
7	Pendaftaran Hak	Pendaftaran Hak/ Sertifikat Pengganti, Sertifikat Karna Hilang/ Rusak
8	Pencatatan	SKPT, Blokir, Sita Jaminan, Pengangkatan Blokir, Pengangkatan Sita

9	Pengakuan Hak	Permohonan sertifikat dari tanah Petok D
10	IPPT	Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan, Ijin Lokasi, Penetapan Lokasi
11	Permohonan Hak Pertama Kali	Hak Milik, HGB, Hak Pakai
12	Permohonan Hak	Perpanjangan HGB, Pembaharuan HGB, Hak Milik, Hak Pakai
13	Peningkatan HGB Ke HM	Perubahan HGB ke Hak Milik <200, >200, >600 m ²

Sumber : KPRI Bhumi Sejahtera BPN Surabaya 1

Seperti yang sudah diketahui di KPRI Bhumi Sejahtera BPN Surabaya 1 mempunyai berbagai macam jenis-jenis map yang biasanya dilakukan untuk berbagai kepengurusan sertifikat yang di proses dalam pengerjaan yang ada di dalam kantor pertanahan kota Surabaya 1 ini. Dan map-map tersebut akan dijual di koperasi kepada semua pemohon pribadi maupun notaris dengan menggunakan sistem manual.

Hubungan yang jelas antar karyawan sudah jelas meskipun masih sederhana. Pembagian tiap unit yang sudah tersusun mulai dari pertokoan, termasuk sistem penjualan dan simpan pinjam masih menggunakan sistem manual, sehingga masih menggunakan nota-nota penjualan dan transaksi simpan pinjam oleh karyawan masih manual.

Pembuatan laporan penjualan tunai dan simpan pinjam kepada KPRI Bhumi Sejahtera setiap harinya menggunakan sistem manual yang membutuhkan proses lama dan menyulitkan bagi karyawan. Dalam pembuatan laporan secara

manual membutuhkan ketelitian sehingga sangat rawan terjadi kesalahan. Apabila terjadi kesalahan, maka karyawan harus mengulangi pencatatan kembali laporannya.

Dalam skripsi ini penulis mengaplikasikan sistem penjualan dan simpan pinjam pada koperasi. Penjualan adalah suatu usaha yang terpadu untuk mengembangkan rencana-rencana strategis yang diarahkan pada usaha pemuasan kebutuhan dan keinginan pembeli guna mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba. Simpan pinjam adalah penghimpunan dan penyaluran dana yang berbentuk penyaluran pinjaman dana dan untuk anggota. Dalam pengaplikasian sistem ini harus memberikan nilai manfaat bagi koperasi untuk dapat menjadi lebih baik dalam sistem pengelolaan dan manajemennya.

Sistem penjualan dan simpan pinjam mempunyai beberapa kelemahan yang menurunnnya kinerja koperasi, oleh sebab itu dibutuhkan sebuah sistem penjualan dan simpan pinjam namun tetap memberikan manfaat yang lebih. Dari uraian latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul "ANALISIS SISTEM PENJUALAN DAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI (KPRI) BHUMI SEJAHTERA DI BPN SURABAYA 1 TAHUN 2015" sebagai judul tugas akhir.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah pada tugas akhir ini yang berjudul "ANALISIS SISTEM PENJUALAN DAN SIMPAN PINJAM PADA KOPERASI (KPRI) BHUMI SEJAHTERA DI BPN SURABAYA 1 TAHUN 2015"

1. Apakah sistem informasi akuntansi penjualan di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bhumi Sejahtera Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 sudah efektif?

2. Apakah proses simpan pinjam di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bhumi Sejahtera Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 sudah berjalan efisien?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengubah sistem informasi akuntansi penjualan ini maka dalam prosesnya yang ada di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 akan menjadikan penjualan lebih efektif untuk sebuah pelayanan kepada masyarakat luas khususnya pemohon dalam proses kepengurusan sertifikat tanah di Surabaya 1 atau wilayah surabaya bagian barat.
2. Untuk mengubah suatu proses simpan pinjam di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 agar berjalan lebih efisien sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh atasan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Aspek akademis

Sebagai penambah bahan referensi bagi mahasiswa/mahasiswi dan pihak-pihak yang memerlukan sistem informasi dan sebagai pembanding antara teori yang selama di dapat dalam perkuliahan dan fakta yang ada di lapangan.

1.4.2. Aspek pengembangan dan ilmu pengetahuan

- a. Untuk menambah wawasan di bidang pengelolaan data sistem informasi penjualan dan simpan pinjam di dalam koperasi, dan

penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan dan pengeluaran dalam pengaplikasian ilmu yang di dapatnya.

- b. Sebagai informasi/wawasan yang berupa masukan atau sumbangan atas pemikiran bagi tempat atau lembaga yang bergerak dalam bidang yang sama.

1.4.3. Aspek Praktis

- a. Bagi penulis meningkatkan wawasan berfikir ilmiah dan kemampuan menganalisis suatu masalah khususnya dalam hal terkait dalam sistem informasi penjualan dan simpan pinjam
- b. Bagi Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bhumi Sejahtera Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1 dapat di jadikan bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk membuat keputusan bagi KPRI Bhumi Sejahtera Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1, khususnya mengenai sistem informasi penjualan dan simpan pinjam.
- c. Bagi STIE Mahardhika diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bagi semua kalangan mahasiswa.